



Pemkab Beli Dua Alat Berat untuk Pelihara Jalan



IST

PERBAIKI JALAN - Pekerja tampak sedang memperbaiki jalan dengan menggunakan dozer.

MELAWI, SP - Dua alat berat berupa satu unit dozer dan eskavator dibeli Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Melawi tahun ini. Alat berat yang menghabiskan kurang lebih Rp4,5 miliar melalui APBD Perubahan Melawi itu direncanakan akan difungsikan sebagai sarana Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di Kecamatan Belimbing tahun depan.

Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Joko Waluyo saat

penyerahan alat berat ke bupati Melawi, Jumat (15/12) menerangkan, dozer senilai Rp2,9 miliar dan eskavator dengan pagu Rp1,6 miliar dibeli melalui e-catalog atau tanpa melalui proses lelang.

"Pengadaan melalui e-catalog yakni dozer D5 dan eskavator FC 200," katanya.

Proses pengadaan dua alat berat ini sendiri hanya memerlukan waktu dua minggu, karena tak melalui proses lelang umum. Dikatakan Joko, excavator dan

dozer ini akan diperuntukkan untuk memperkuat UPJJ, khususnya di wilayah Kecamatan Belimbing setahun ke depan.

"Jadi untuk perbaikan ruas jalan di Belimbing dan Belimbing Hulu. Karena ruas jalan di sana tidak mampu kita anggarkan untuk peningkatan melalui DAU (Dana Alokasi Umum). Jadi dianggarkan melalui UPJJ untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak parah," katanya.

PUPR, lanjut Joko, akan



membuat pos di wilayah Belimbing Hulu. Alat berat nantinya akan terus berada di ruas tersebut. PUPR juga akan menyiapkan SK untuk operator, helper dan mekanik yang akan *stanby* di Belimbing.

"Jadi selain alat berat juga disiapkan operator satu paket yang akan bertugas setahun di sana. Mereka nantinya akan memperbaiki ruas jalan tersebut," katanya.

Saat ini, lanjut Joko, PUPR memang sudah memiliki dua dozer, eskavator satu, grader satu dan vibro satu. Alat berat ini biasa dipertukarkan bagi UPJJ untuk memperbaiki ruas jalan yang memang membutuhkan penanganan segera. Joko juga menerangkan saat ini memang PU memfokuskan perbaikan jalan ke ruas Belimbing.

"Ruas jalan lain, nanti kita akan perbaikan bertahap. Seperti ruas jalan ke Kotabaru sudah kita perbaikan dengan

greder. Jadi kita cari daerah yang memang kondisi jalannya atau medannya parah. Seperti di Belimbing, kita fokus untuk perbaikan ruas jalan di Bukit Dolek yang merupakan akses menuju Balai Agas, karena di sana memang parah," katanya.

Untuk dukungan anggaran, Joko mengungkapkan tahun depan rencananya ada sekitar Rp1 miliar dana yang dikururkan melalui UPJJ di wilayah Belimbing.

Sementara itu, Bupati Melawi, Panji se usai penyerahan alat berat menerangkan alat berat yang sudah diterima secara resmi diserahkan dari Pemkab Melawi ke Dinas PUPR untuk dioperasikan sebagai alat kelengkapan UPJJ.

"Ke depan, nanti jalan-jalan pedalaman tidak lagi mengharap jalan yang melalui proyek. Tapi dilaksanakan secara swakelola. Walau belum diuji secara teknis, pekerjaan alat berat ini

bila diukur dalam waktu setahun, melalui capaian panjang jalan maupun volume, mungkin kita tidak mampu menguangkannya," katanya.

Karena itu, lanjut Panji, dengan menggunakan sistem proyek, Pemda sulit berbuat karena keterbatasan dana yang ada. Namun, bila dikerjakan dengan pola swakelola, pemerintah bisa bekerja *mobile* sepanjang waktu, hanya tetap mengkaji sistem pembiayaan; operasional dan pemeliharaan.

"Kita bisa belajar pada PT Erna atau PT yang bergerak di bidang perikanan yang pernah ada, bagaimana cara kerja yang *mobile* setiap waktu, tidak kenal berhenti. Nah inilah yang dimaksudkan dengan pengadaan alat berat ini," katanya.

Sehingga, tambah Panji, dengan proyek dalam satu tahun nantinya akan diukur sesuai panjang dan volume

pekerjaan, bila dibayar dengan sistem proyek maka akan berapa kali lipat dari harga alat berat tersebut.

"Maka saya nilai kita diuntungkan dengan pola swakelola, pola UPJJ, daripada cara proyek. Visi misi saya *kan* kita membangun dari desa. Nah, ini salah satunya, masukkan alat, kerja dari pedalaman, minimal ya semua desa yang ada di Melawi bisa didatangi roda empat paling tidak saat musim kemarau," harapnya.

Panji juga menegaskan terkait pola pembiayaan dan perawatan serta BBM dan operator, ia tetap meminta masukan untuk pengelolaan alat berat ke TP4D maupun ke BPK selain juga pada dinas teknis seperti Dinas PUPR terkait, seperti apa pembiayaannya.

"Sehingga tak menjadi masalah kedepan atau menjadi temuan," pungkasnya. **(eko/bah)**